

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA
YANG TERKAIT DENGAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Robert Haryanto Watratan
Budiman Ginting
Agusmidah
Mahmud Mulyadi

sawit.satu@yahoo.com

ABSTRACT

Human trafficking is a crime. TKI (Indonesian workers), especially children, in foreign countries are vulnerable to be the object of human trafficking. The police has strategic role in preventing and eradicating it and illegal TKI placement. The regulation on criminal act in the placement of TKI in foreign countries only states that illegal individuals are prohibited to send TKI to foreign countries or illegal TKI is prohibited. The role of Polda Sumut investigators is to optimize the relationship among nations. The obstacles faced by Polda Sumut can be judicial and non-judicial. Some efforts are to increase preemptive, preventive, and repressive actions. It is recommended that Law No. 1/2006 on Mutual Legal Aid in Criminal Act should be optimized, the national interest principle of the Aid Requesting Countries should be prioritized to accelerate the process of law enforcement in the Aid Requesting Countries, and prevention should be more prioritized than eradication.

Kata Kunci: Keywords: Role of Police Investigators, Placement of TKI in Foreign Countries, Human Trafficking Criminal Act

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri cenderung mengakibatkan dampak buruk bagi TKI itu sendiri, TKI menjadi terlanter bahkan tidak jarang mengarah pada perbuatan eksploitasi seksual dan perdagangan orang, cenderung mengarah pada tindakan kejahatan yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM.¹

Kelemahan pengaturan Pasal 297 KUH Pidana tidak mampu mengakomodasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual. Pasal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi.²

UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) membawa banyak paradigma pengaturan baru mengenai TKI baik di dalam maupun ke luar negeri. Lembaga perekrutan TKI yang

¹ Elfina Lebrine Sahetapy, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Etiologi Kriminal", *Jurnal Yustika*, Vol. 13, 1 Juli 2010, Fakultas Hukum Ubaya, hal. 17.

² Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal. 14.

diselenggarakan oleh pihak swasta menurut UU PPTKI saat ini disebut PJTKI yang berada di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha secara resmi. Sebelum UU PPTKI ini berlaku, PJTKI melakukan kegiatan tanpa izin. Tidak berarti semua TKI yang dikirim memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk berimigrasi ke luar negeri.³

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan kriminal dalam kaitannya dengan akses ke luar negeri.⁴ Wilayah Provinsi Sumatera Utara rentan menjadi daerah asal pengiriman para TKI. Penyebabnya adalah posisi geografis, memiliki akses langsung ke luar negeri baik melalui darat, laut, dan udara serta transportasi dan perekonomian, yang cukup baik. Provinsi Sumatera Utara merupakan pintu gerbang penting bagi lalu lintas internasional. Bagian utara provinsi ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia yang merupakan bagian dari segi tiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.⁵

Kota Madya Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, dan Labuhan Batu diklasifikasikan sebagai daerah asal pengiriman para TKI. Medan, Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu sebagai daerah transit TKI ilegal.

Modus operandi pelaku umumnya berupa janji (iming-iming) tersangka kepada korban yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dan diuruskan surat-surat izin dari yang berwajib tetapi setelah tiba di Malaysia korban tidak memiliki surat kerja (Permit Kerja) sehingga korban ketakutan dan berupaya meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Korban dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan diurus surat izin dari berwajib tetapi setelah tiba di Malaysia ternyata korban dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa dokumen resmi.

Pada tahun 2011 Polda Sumut melakukan upaya pencegahan melalui koordinasi dengan pihak Pemda agar pihak Dinas Kependudukan mempersempit peluang untuk memberikan surat pengantar mengurus paspor atau surat-surat berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri bagi yang tidak memiliki izin usaha untuk perusahaan tenaga kerja ke luar negeri. Polda Sumut juga melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan jasa TKI swasta yaitu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Propinsi Sumut.⁶

Secara umum modus operandi yang dilakukan oleh orang perseorangan untuk kasus-kasus pada tabel 3 di atas diketahui penyidik, antara lain: menjual korban dan menjadi pelayan seks komersil di Malaysia, melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa WNI atau perseorangan ke luar negeri, dan perseorangan menempatkan TKI ke luar negeri tanpa izin atau tidak memiliki dokumen resmi dari pihak yang berwajib.⁷

Hanya ada dua lembaga yang boleh melaksanakan perusahaan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana di Pasal 10 UU PPTKI yaitu: Pemerintah dan Pelaksana penempatan TKI swasta. Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya UU

³ Rahmat Syafaat, *Dagang Manusia, Kajian Trafiking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Jogjakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hal. 32.

⁴ Biro Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011.

⁵ Rizki Amelia Febriani, "Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia Dengan Negara Lain", <http://rizkiamaliefbriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/>, diakses tanggal 08 Februari 2013.

⁶ Laporan Kasubit IV Renakta Polda Sumut Tahun 2011.

⁷ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, "Data Kasus TKI Tahun 2012 di Jajaran Polda Sumut.

PPTKI ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) hingga setelah berlakunya UU PPTKI ini memperoleh izin dari Pemerintah.⁸

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim atas nama pelapor Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, diketahui bahwa korban ditangkap dan dipenjarakan oleh Polisi Diraja Malaysia sejak tahun 2010 karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai TKI.⁹

Pelaku Berta Jojo Hutasoit adalah orang perseorangan pengusahaan TKI ilegal mempekerjakan korban Rini Helena Agustina Hutapea dan Ibunya Ellysa Basa Hutasoit pada tahun 2007 untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Pada tahun 2009 Ibunya dikembalikan pelaku ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen resmi. Tetapi anaknya tetap ditempatkan pelaku di Malaysia walaupun tidak memiliki dokumen resmi hingga bulan Mei tahun 2010 akhirnya korban Rini Helena Agustina Hutapea ditangkap Polisi Diraja Malaysia dan dipenjarakan di Penjara Kajang Malaysia.¹⁰

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Sumut tersangka dikenakan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) jo Pasal 102 UU PPTKI. Dalam BAP yang disertai bukti-bukti dari penyidik dinyatakan BAP tersebut belum lengkap (P-19) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena sesuai dengan keterangan tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).¹¹

Korban Rini Helena Agustina Hutapea dan Ibunya Ellysa Basa Hutasoit berangkat ke Malaysia menemui agen TKI yang berada di Malaysia bernama Zeflaw. Kejatisu memberi petunjuk agar yang bernama Zeflaw dibuat sebagai saksi dalam BAP Polda Sumut. Pihak yang mengurus paspor atas nama Rini Helena Agustina Hutapea dan Ibunya Ellysa Basa Hutasoit adalah Firman Silitonga sebagai Pegawai Imigrasi. Petunjuk Kejatisu agar yang bernama Firman Silitonga dibuat sebagai saksi dalam BAP Polda Sumut.

Bukti pada kasus ini sudah cukup tetapi Kejatisu meminta agar pihak penyidik Polda Sumut memperbaiki berita acara penyidikan. Persyaratan yang kurang terpenuhi dalam BAP menurut Kejatisu adalah menyangkut persyaratan formil yakni kedua orang saksi Zeflaw dan Firman Silitonga yang diterangkan tersangka kepada Kejatisu. Dari uraian tersebut di atas, maka dipilih “Peranan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana yang Terkait dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” sebagai judul dalam penelitian ini.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri?
- b. Bagaimanakah peranan penyidik Polda Sumut dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri?
- c. Apakah hambatan-hambatan Polda Sumut dan upaya-upaya penanganan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri?

3. Tujuan Penelitian

⁸ Rahmat Syafaat, *Op. cit*, hal. 32.

⁹ Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim atas nama pelapor Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea, hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 2.

¹¹ Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-205/N.2.4/Epp.2/01/2011 tertanggal 18 Januari 2011.

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri.
- b. Untuk mengetahui peranan penyidik Polda Sumut dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Polda Sumut dan upaya-upaya penanganan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan bermanfaat bagi masyarakat yang kurang memahami prosedur penempatan TKI secara resmi ke luar negeri.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait antara lain: Penyidik Kepolisian, Jaksa, Hakim, Advokat atau Pengacara, Lembaga Pemasyarakatan termasuk petugas Imigrasi.

B. KERANGKA TEORI

UUD 1945 mengakui perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Norma ini mengandung makna cukup luas termasuk semua orang secara tidak terbatas meliputi laki-laki, perempuan, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa. Berarti hak kesempatan bekerja setiap orang dilindungi dalam konsep negara hukum.

Adanya jaminan terhadap HAM sekaligus menjadi ciri negara hukum.¹² Konstitusi negara hukum haruslah mengandung jaminan terhadap HAM. Hak untuk bekerja merupakan bagian dari HAM. Tetapi dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) diakui pula pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penyidikan, dan pemeriksaan yang pada hakikatnya terjadi pembatasan-pembatasan HAM.¹³

Peran Polisi tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen menentukan berjalannya suatu hukum dalam masyarakat. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya.¹⁴ Ketiga faktor tersebut sebagai penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Penekanan ini hendaknya pada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.¹⁵

Perlindungan hak-hak para TKI di luar negeri dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan positif dan partisipasi aktif dari sistem hukum yang ada termasuk partisipasi dari semua pihak dalam segala aspek kehidupan, kemampuan penegak hukum, dan termasuk budaya dan agama. Betapapun canggihnya aturan dan perundangan dan mantapnya

¹² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

¹³ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 34. Lihat juga: Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hal. 5.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9. Lihat juga: Lawrence M. Friedman, dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

aktivitas penegak hukum, jika tidak ditopang dengan nilai-nilai budaya dan agama, tujuan penegakan hukum sulit dicapai.¹⁶

Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam pelaksanaan penyidikan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Penyidik Polda Sumut. Penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri diperlukan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Kerjasama antar negara untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara peminta maupun Negara diminta.¹⁷

Perlunya bantuan hukum untuk mempermudah proses pembuktian dalam rangkaian proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil dan alat-alat bukti yang dikemukakan.¹⁸ Pembuktian diperlukan jika dakwaan JPU dibantah oleh terdakwa.¹⁹ Pembuktian bagi hakim bersifat aktif, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan tentang apa yang dituduhkan kepada terdakwa.²⁰

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Penempatan Tki Di Luar Negeri

Hak untuk bekerja bagi setiap orang Warga Negara Indonesia merupakan sebahagian dari HAM sebagaimana telah diatur secara normatif dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam UU HAM tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh kesempatan bekerja bagi WNI baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam UU HAM terkandung beberapa aspek dari HAM itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari hak kodratnya sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh hukum dan pemerintahan.²¹

Melalui UU HAM, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.²² Menurut Pasal 9 UU HAM, dalam mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, dapat diwujudkan dengan pemberian kesempatan atau kebebasan bagi WNI untuk bekerja.

Selain itu, UUPPTPO sebagai salah satu produk kebijakan publik, maka harus memastikan isinya harus dapat mengakomodasi kepentingan publik. Sebagai produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mempidanakan pelaku perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan

¹⁶ Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Ha-Hak Anak dan Penerapannya*, Tesis, (Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2005), hal. 129-130.

¹⁷ Paragraf 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 7.

¹⁹ R. Supomo, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 62-63.

²⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 32-33.

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 107.

²² Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hal. 1.

kepada korban secara menyeluruh dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus.

Kebijakan pengaturan dimaksud dibentuk karena tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, juga melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara dan merupakan kejahatan *transnational crime*.²³

UUPTPO dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, dan undang-undang ini lebih komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang diposisikan pada kondisi yang rentan dan atau ter subordinasi yakni perempuan dan anak.²⁴

Tindak pidana perdagangan orang pada prinsipnya merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara serta dianggap melecehkan martabat bangsa. Ketentuan hukum materil dalam UUPTPO mengatur unsur-unsur tindak pidana yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan hukum internasional serta adanya ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan secara khusus mengenai penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dikecualikan dari ketentuan KUHP misalnya digunakannya alat bukti elektronik dalam Pasal 29 UUPTPO.²⁵

Pengaturan tindak pidana terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 UUPPTKI. Jenis tindak pidana yang pertama diatur dalam Pasal 102 angka 1 huruf a UUPPTKI adalah orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri. Dalam ketentuan ini dilarang orang perseorangan melakukan usaha penempatan TKI ke luar negeri. Menempatkan WNI yang dimaksud dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan WNI untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.

Jenis tindak pidana kedua yang dilarang menurut Pasal 102 angka 1 huruf b UUPPTKI di atas adalah perusahaan yang bertindak sebagai pelaksana penempatan TKI swasta yang tidak mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri.²⁶ Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor atau calo yang melakukan perekrutan terhadap calon TKI.²⁷

Ditentukan dalam Pasal 10 UUPPTKI hanya ada 2 (dua) lembaga pelaksana yang diperbolehkan undang-undang untuk melaksanakan usaha penempatan TKI di luar negeri

²³ *Ibid.*

²⁴ Diktum pada Menimbang alinea b UUPTPO.

²⁵ Diatur pada Pasal 28 bab V UU TPPO. Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

²⁶ Pasal 1 angka 13 UUPPTKI. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

²⁷ Latifah Zahrah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Penempatan Calon Tenaga Kerja (CTKI) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2010), hal. 1.

yakni terdiri dari Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta. Lembaga pemerintah misalnya Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (Depnaker) sedangkan lembaga swasta antara lain seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang telah memperoleh izin berupa SIPPTKI dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.²⁸

Jenis tindak pidana ketiga yang dilarang menurut Pasal 102 angka 1 huruf c UUPPTKI di atas adalah perbuatan yang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI atau TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Dalam Pasal 103 UUPPTKI ditentukan pula bentuk-bentuk tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri. Menyangkut perbuatan dari Pelaksana penempatan TKI swasta di mana Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain. Izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri hanya dapat diberikan kepada Pelaksana penempatan TKI swasta yang memenuhi persyaratan.²⁹

Dengan persyaratan yang diberikan undang-undang kepada Pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana di atas, undang-undang mensyaratkan perusahaan jasa tenaga kerja swasta harus memenuhi standar tertentu dengan tujuan untuk memudahkan mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI.

Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPPTKI yang dalam praktek sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau “numpang proses”. Apabila hal ini ditolerir atau dibolehkan maka akan membuat kesulitan bagi pihak keluarga TKI untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI, termasuk kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mencari pihak yang bertanggung jawab. Termasuk dalam kategori ini tindak pidana yang diatur dalam Pasal 33 UUPPTKI yakni tindakan Pelaksana penempatan TKI swasta yang mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Pengerahan (SIP)³⁰ kepada pihak lain.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri termasuk dalam hal tidak memenuhi syarat-syarat bagi calon TKI yang ditentukan dalam Pasal 35 UUPPTKI, berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana penempatan TKI swasta wajib disyaratkan terhadap calon TKI. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Pelaksana penempatan swasta atau PJTKI yang berizin maka undang-undang dapat dikenakan atas perbuatannya sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c UUPPTKI yakni melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UUPPTKI adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, banyak TKI yang tidak prosedural atau datang ke negara luar di luar prosedur.³¹ Usaha menempatkan TKI di luar

²⁸ Rahmat Syafaat, *Op. cit.*, hal. 32.

²⁹ Pasal 13 ayat (1) UUPPTKI.

³⁰ Pasal 1 angka 14 UUPPTKI.

³¹ <http://tki.web.id/?tag=tindak-pidana>, diakses tanggal 18 Februari 2013. TKI Ilegal Juga Harus Dilindungi. Ditulis Admin Kementerian Luar Negeri.

negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UUPPTKI merupakan tindak pidana menurut undang-undang ini. Pasal 68 ayat (1) UUPPTKI menegaskan Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Kewajiban asuransi bagi penempatan TKI disebabkan karena dalam kehidupan TKI penuh dengan ketidakpastian.

Risiko ketidakpastian itu merupakan peristiwa hukum seperti peristiwa kematian yang berdampak pada kaitannya dengan istri/suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Peristiwa hukum demikian senantiasa cenderung akan dialami manusia khususnya para TKI namun tidak pasti kapan peristiwa hukum itu terjadi.³² Setiap manusia berkemungkinan akan menghadapi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian atau suatu kehilangan hidupnya untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup.³³ Dengan memilih program asuransi khususnya bagi para TKI merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisir risiko dari ketidakpastian dimaksud.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UUPPTKI sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas merupakan tindak pidana kejahatan. Kejahatan dalam Pasal 102 UUPPTKI diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun sedangkan kejahatan dalam Pasal 103 UUPPTKI diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 104 UUPPTKI merupakan tindak pidana pelanggaran bagi setiap orang yang melakukan menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha.

Pasal 26 ayat (1) UUPPTKI juga melarang menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri. Pasal 46 UUPPTKI merupakan tindak pidana pelanggaran mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jika setiap orang dari PJTKI mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Termasuk perbuatan pelanggaran menurut Pasal 104 UUPPTKI adalah PJTKI yang menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Menurut ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUPPTKI pemenuhan syarat dokumen merupakan syarat wajib pemberangkatan bagi calon TKI. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian penempatan kerja.

UUPPTKI tidak mengatur pengenaan sanksi terhadap badan hukum atau korporasinya jika perbuatan itu terkait dengan masalah penempatan TKI. Hal ini tampak dari pengaturan ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104. Di mana dalam pasal-pasal ini sanksi pidana dan ganti rugi hanya dikenakan kepada perbuatan setiap orang dan setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini ditujukan kepada orang bukan kepada badan hukumnya atau perusahaan.

Di samping itu, Pemerintah dapat mengupayakan optimalisasi melalui UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk meminta bantuan hukum negara lain dalam proses penyidikan perkara pidana. Menurut Romli Atmasasmita, munculnya istilah bantuan hukum timbal balik sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai tindak pidana yang sifatnya lintas batas.³⁴

³² Tuti Restuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 5.

³³ Emmy Pangaribuan S, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangan*, (BPHN: 1980), hal. 3.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 39.

Undang-undang ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.³⁵ Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Negara Diminta.³⁶

Bantuan hukum timbal balik pada prinsipnya dapat dilakukan 3 (tiga) bentuk yaitu bilateral, regional, dan multilateral.³⁷ Bantuan hukum timbal balik harus dilaksanakan melalui kerjasama antar negara yang membutuhkannya. Perjanjian bantuan hukum timbal balik pada prinsipnya harus memperhatikan prinsip persamaan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dan kedaulatan dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut, dan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian internasional berlaku dan mengikat secara politik dan hukum kepada negara-negara yang membuatnya.³⁸

2. Peranan Penyidik Polda Sumut Dalam Penanganan Tindak Pidana Penempatan TKI di Luar Negeri

Berdasarkan informasi diperoleh dari Biro Operasi Polda Sumut, modus operandi yang diketahui penyidik pada kasus-kasus umumnya pelaku menjanjikan korban sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dan diuruskan surat-surat izin dari yang berwajib tetapi setelah tiba di Malaysia korban tidak memiliki surat kerja (Permit Kerja) sehingga korban ketakutan dan berupaya meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Ada juga korban yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan diurus surat izin dari berwajib tetapi setelah tiba di Malaysia ternyata korban dijual untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim atas nama pelapor Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea, Penyidik Polda Sumut melakukan penanganan dengan melibatkan unsur asing di mana dalam kasus ini pihak Kepolisian Malaysia turut serta dalam proses penyelidikan kasus ini.³⁹ Kerjasama ini dilakukan sebagai salah satu implementasi dari UU No.1 Tahun 2006. Kerjasama ini dalam rangka bantuan hukum timbal balik secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia.⁴⁰

Kerjasama dalam urusan penempatan TKI antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia telah dilakukan dalam berbagai perjanjian ataupun melalui MoU antar kedua negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri antara kedua negara telah ada 8 (delapan) kali dibuat perjanjian kerjasama dalam masalah penanganan TKI sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.⁴¹

³⁵ Pasal 2 UU No.1 Tahun 2006.

³⁶ Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 2006.

³⁷ Zulkarnain Sitompul, "Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerja Sama Internasional", Artikel dalam *Jurnal Forum Keadilan*, Nomor 40, Tanggal 13 Februari 2005, hal. 32.

³⁸ Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan Dalam Perjanjian Bantuan Hukum timbal Balik Mengenai tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, Tanggal 29 s/d 30 Agustus 2006, hal. 21.

³⁹ Polisi Diraja Malaysia, Nomor Laporan Dato Keramat/00317710/10 atas nama Polisi Malaysia Noorsiah BT MD Zulkifli.

⁴⁰ Zulkarnain Sitompul, *Op. cit*, hal. 32.

⁴¹ <http://kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/malaysia.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2013.

Terkait dengan penempatan TKI yang bermasalah di Malaysia secara hukum khususnya masalah tindak pidana, Pemerintah dapat mengupayakan optimalisasi melalui UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk meminta bantuan hukum negara lain dalam proses penyidikan perkara pidana tujuannya untuk mengatasi dan memberantas berbagai tindak pidana yang sifatnya lintas batas (*transnasional*).⁴²

Pasal 2 UU No.1 Tahun 2006 ditentukan tujuan bantuan hukum ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Dalam mengupayakan kerjasama dimaksud, pihak Polda Sumut telah mengoptimalkan permintaan bantuan. Diperoleh bahwa pelaku dalam kasus ini adalah Berta Jojo Hutasoit yang merupakan orang perseorangan secara ilegal menempatkan TKI ke Malaysia atas nama Rini Helena Agustina Hutapea untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim diketahui bahwa pelapor adalah Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea. Korban ditangkap dan dipenjarakan oleh Polisi Diraja Malaysia sejak tahun 2010 karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai TKI.⁴³

Awal peristiwa ini pelaku mempekerjakan korban Rini Helena Agustina Hutapea dan ibunya Ellysa Basa Hutasoit pada tahun 2007 untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Pada tahun 2009 ibunya dikembalikan pelaku ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen resmi. Tetapi anaknya tetap ditempatkan pelaku di Malaysia walaupun tidak memiliki dokumen resmi hingga bulan Mei tahun 2010 akhirnya korban Rini Helena Agustina Hutapea ditangkap Polisi Diraja Malaysia dan dipenjarakan di Penjara Kajang Malaysia. Alasan penangkapan ini karena melanggar hukum imigrasi Malaysia.⁴⁴

Rini Helena Agustina Hutapea ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia pada tanggal 16 Juni 2010, dihukum selama 12 (dua belas) bulan penjara oleh *Sepang Magistrate Court* melanggar Sek 15 (4) *Immigration Act* (1959/63) yang akan dibebaskan pada tanggal 2 Februari 2012.⁴⁵ Posisi Rini Helena Agustina Hutapea di Malaysia dalam hal ini sebagai tersangka/terdakwa sedangkan di Indonesia posisinya sebagai korban penipuan penempatan TKI ilegal.

Penyidik Polda Sumut melaksanakan penyidikan sejak tanggal 21 Oktober 2010 melalui Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP Sidik/316/X/2010/Dit Reskrim. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Sumut tersangka dikenakan Pasal 4 UUPTPPO jo Pasal 102 UU PPTKI. Dalam BAP yang disertai bukti-bukti dari penyidik dinyatakan BAP tersebut belum lengkap (P-19) oleh Kejatisu karena agen TKI yang berada di Malaysia bernama Zeflaw tidak dimuat dalam BAP teramsuk saksi Firman Silitonga sebagai Pegawai Imigrasi.⁴⁶

⁴² Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hal. 40.

⁴³ Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim atas nama pelapor Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea, hal. 1.

⁴⁴ Surat Interpol Kuala Lumpur Nomor: (IP) KPN (PR) 71/5/47 tertanggal 29 November 2010 perihal WNI atas nama Rini Helena Agustina Hutapea.

⁴⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Hubungan Internasional, Surat Nomor Divhubinter/Fax/2599/XII/2010 kepada kapolda Sumut tertanggal 14 Desember 2010 atas nama Anas Yusuf (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Karo Misi Internasional).

⁴⁶ Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-205/N.2.4/Epp.2/01/2011 tertanggal 18 Januari 2011.

Penyidik mengenakan Pasal 4 UUPTPO jo Pasal 102 UUPPTKI. Dalam Pasal 4 UUPTPO ditentukan larangan bagi setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Unsur-unsur yang terkandung ketentuan ini mencakup unsur setiap orang, unsur membawa Warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia, dan tujuan untuk dieksploitasi di negara lain.

Hal-hal yang memenuhi unsur setiap orang dapat diketahui dari alat bukti saksi-saksi antara lain: Ellys Basa Hutasoit, Tumpak Manurung, Romaida Br Nababan, dan Ellys Solita Sitorus menjelaskan bahwa orang yang mempekerjakan Rini Helena Agustina Hutapea beserta ibunya Ellys Basa Hutasoit adalah Berta Jojo Hutasoit. Dalam hal ini ibunya Ellys Basa Hutasoit adalah saksi korban yang melapor sekaligus juga sebagai korban atas penempatan TKI ilegal ke Malaysia.

Unsur membawa WNI ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi bahwa Rini Helena Hutapea telah diberangkatkan tersangka ke Malaysia. Unsur membawa ke luar negeri dapat diketahui menurut keterangan saksi Anggiat Napitupulu dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan membenarkan bahwa korban Rini Helena Agustina Hutasoit memiliki Paspor yang tercatat di Kantor Imigrasi pada tanggal 20 Maret 2007 yang berlaku sampai tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Paspor P 309159. Dengan adanya Paspor korban tersebut maka telah terpenuhi unsur membawa ke luar negeri atau ke luar wilayah Republik Indonesia.⁴⁷

Aspek hukum yang selanjutnya dilanggar tersangka antara lain Pasal 4 UUPPTPO adalah setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Syarat pemenuhan unsur tujuan atau maksud untuk dieksploitasi diperoleh dari fakta-fakta kesaksian dari para saksi-saksi: Ellys Basa Hutasoit, Tumpak Manurung, Romaida Br Nababan, Alida Br Siburian, Ellys Solita Sitorus, dan pengakuan dari tersangka sendiri yakni Berta Jojo Hutasoit bahwa korban Rini Helena Hutapea dan ibunya Ellys Basa Hutasoit diberangkatkan tersangka ke Malaysia untuk tujuan sebagai TKI dan tersangka memperoleh keuntungan dari setiap pemberangkatan 1 (satu) orang TKI sebanyak 1.500 RM.⁴⁸

Tersangka juga dikenakan Pasal 102 UUPPTKI yang pengaturan tindak pidana terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri ditentukan sebagai tindak pidana kejahatan. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan setiap orang. Unsur setiap orang dalam Pasal 102 UUPPTKI telah terpenuhi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi: Ellys Basa Hutasoit, Tumpak Manurung, Romaida Br Nababan, dan Ellys Solita Sitorus menjelaskan dan membenarkan bahwa yang mempekerjakan korban Rini Helena Agustina Hutasoit dan ibunya Ellys Basa Hutasoit adalah tersangka Berta Jojo Hutasoit.

Unsur yang memenuhi menempatkan TKI tanpa izin juga telah terpenuhi yang diperoleh dari fakta-fakta berdasarkan penjelasan dari saksi-saksi: Ellys Basa Hutasoit, Tumpak Manurung, Romaida Br Nababan, dan Ellys Solita Sitorus menjelaskan bahwa tersangka memberangkatkan korban ke Malaysia secara tanpa izin dan melalui perseorangan yaitu tersangka sendiri secara langsung terlibat didalamnya. Unsur secara tanpa izin menempatkan TKI ke luar negeri juga diperoleh dari keterangan ahli dari BP3TKI atas nama Siti Rolijah, SH, M.Hum yang menerangkan bahwa pada PJTKI tidak

⁴⁷ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anggiat Napitupulu pada Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2010 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe, hal. 2-3.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 3.

terdapat TKI atas nama korban Rini Helena Agustina Hutapea dan ibunya Ellys Basa Hutasoit.⁴⁹

Menurut Pasal 4 UUPPTKI, orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri yang dalam ketentuan ini dilarang orang perseorangan tersebut melakukan penempatan TKI ke luar negeri. Menempatkan WNI yang dimaksud dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan WNI untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.

Sekalipun ditempatkan oleh Perusahaan yang bertindak sebagai pelaksana penempatan TKI swasta jika tidak mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri juga merupakan perbuatan yang ilegal menurut ketentuan ini.⁵⁰ Hanya ada 2 (dua) lembaga pelaksana yang diperbolehkan dalam Pasal 10 UUPPTKI untuk melaksanakan kegiatan penempatan TKI di luar negeri yakni terdiri dari: Pemerintah dan Pelaksana penempatan TKI swasta.

Lembaga pemerintah misalnya Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (Depnaker) dan BNP2TKI sedangkan lembaga swasta antara lain seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang telah memperoleh izin berupa SIPPTKI dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Perbuatan yang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan juga merupakan hal yang dilarang menurut Pasal 102 UUPPTKI. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI atau TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Penyidik Polda Sumut membuat berkas perkara telah memenuhi syarat formil walaupun Kejatisu meminta agar pihak penyidik Polda Sumut memperbaiki BAP Nomor Pol. BP/218/XI/2010 Dit Reskrim tertanggal 24 November 2010 untuk diperbaiki selama 14 (empat belas) hari setelah diterima BAP berkenaan dengan kurangnya persyaratan formil dalam BAP menyangkut dua orang saksi Zeflaw (agen TKI di Malaysia) dan Firman Silitonga yang diterangkan tersangka kepada Kejatisu.

Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁵¹ Pasal 183 KUHAP, menentukan penjatuhan sanksi harus didasarkan pada keyakinan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Ketentuan ini merupakan syarat formil pembuktian yang dalam kasus ini telah terpenuhi di mana saksi-saksi yang dihadirkan terdiri dari 7 (tujuh) orang yakni: Ellysa Basa Hutasoit, Anggiat Napitupulu, Tumpak Manurung, Ellys Solita Sitorus, Romaida Br Nababan, dan Alida Br Siburian.

Saksi-saksi tersebut di atas merupakan alat bukti yang pertama dalam Pasal 184 huruf a KUHAP yaitu keterangan saksi. Sedangkan saksi Siti Rolijah, SH, M.Hum adalah untuk memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Dalam kasus ini juga telah disertai adanya keterangan tersangka/terdakwa yang mengakui perbuatannya menempatkan TKI secara ilegal ke Malaysia. Dengan demikian syarat formil telah terpenuhi 3 (tiga) alat bukti. Sedangkan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 1 angka 13 UUPPTKI. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 278-279.

syarat terakhir yakni keyakinan hakim akan dibuktikan di dalam persidangan berdasarkan keyakinannya.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut diketahui bahwa ketentuan tersebut mengandung dua unsur penting yakni: sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 184 KUHAP syarat formil pembuktian dalam kasus ini telah terpenuhi sehingga tidak mesti Kejatisu membalikkan berkas perkara Nomor Pol. BP/218/XI/2010 Dit Reskrim tertanggal 24 November 2010 ke penyidik Polda Sumut untuk diperbaiki.

Sangat tidak beralasan jika berkas perkara dari Penyidik Polda Sumut dinyatakan belum lengkap (P-19) oleh Kejatisu.⁵³ Sehubungan dengan itu menurut teori pembuktian secara negatif menggabungkan secara terpadu jenis pembuktian menurut keyakinan dengan jenis pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka berkas perkara dari penyidik sah dan lengkap secara hukum.

Jika salah satu di antara dua unsur dalam Pasal 183 KUHAP tidak ada, maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan tersangka/terdakwa. Ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan tersangka/terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Di antara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Dikatakan dalam kasus ini tersangka menempatkan TKI secara ilegal karena bertentangan dengan Pasal 4 UUPPTKI. Kemudian tersangka tidak memenuhi persyaratan dokumen yang harus diurus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 UUPPTKI. Dalam menempatkan calon TKI atau TKI harus memiliki dokumen resmi. Korban dalam kasus ini hanya memiliki dokumen berupa: Kartu Keluarga (KK), KTP, Ijazah Rini Helena Agustina Hutapea, dan Pasport yang berlaku dari tanggal 20 Maret 2007 sampai tanggal 20 Maret 2012. Korban Rini Helena Agustina Hutapea tidak memiliki dokumen dimaksud resmi.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 67 UUPPTKI pemenuhan syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUPPTKI merupakan syarat wajib pemberangkatan TKI ke luar negeri secara resmi. Pemberangkatan TKI ke luar negeri secara resmi dapat dilaksanakan setelah kewajiban pemenuhan syarat dokumen dalam Pasal 51 UUPPTKI telah terpenuhi dan wajib diberangkatkan oleh BP3TKI Sumatera Utara.

Sifat melawan hukum tersangka adalah karena penempatan TKI ke luar negeri dilakukannya sendiri secara tanpa izin, bukan dalam bentuk Perusahaan yang memiliki izin dari Pemerintah melainkan hanya sebagai orang perseorangan. Kasus di atas berujung pada penelantaran TKI di Malaysia di mana TKI tersebut tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 51 UUPPTKI sehingga TKI ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia.

Oleh karena tersangka tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUPPTKI maka kepada tersangka dapat juga dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 103 ayat (1) huruf f UUPPTKI yang dipidana dengan pidana penjara

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 260.

⁵³ Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B/6344/N.2.4/Epp.2/12/2010 tertanggal 3 Desember 2010 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan An. Tersangka Berta Jojor Hutasoit Dinyatakan Belum Lengkap (P-19).

⁵⁴ Wawancara dilakukan terhadap korban Rini Helena Agustina Hutapea pada tanggal 28 Februari 2013. Lihat juga: Berita Acara Pemeriksaan Korban Rini Helena Agustina Hutapea pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2011 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe bersama-sama dengan Penyidik Pembantu Martianna Sembiring, hal. 3.

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun bagi setiap orang yang menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen.

Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf f UUPPTKI ini tidak disertakan dalam berkas perkara dari Penyidik Polda Sumut. Sebab dalam pertimbangannya sanksi dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f UUPPTKI ini lebih kecil dibandingkan dengan Pasal 102 UUPPTKI yang ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pengenaan sanksi dalam Pasal 102 UUPPTKI (besar) dibandingkan dengan sanksi dalam Pasal 103 UUPPTKI (kecil) didasarkan pada pertimbangan bahwa pemidanaan mengandung karakter retributivitis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari.⁵⁵ Penyidik Polda Sumut menerapkan Pasal 102 UUPPTKI untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan sanksi pidana dalam memperbaiki dan memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Hambatan-Hambatan dan Upaya-Upaya yang Dilakukan Polda Sumut

Berikut ini beberapa hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan Polda Sumut antara lain:

a. Menghadirkan alat bukti keterangan saksi

Hambatan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 16 UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, di mana ketentuan ini menentukan warga negara asing tidak dapat dipidana jika tidak bisa memenuhi permintaan bantuan hukum untuk dijadikan sebagai saksi di Indonesia demikian sebaliknya. Sehingga untuk menghadirkan saksi kunci dalam perkara pidana akan terasa sulit bagi pihak Kepolisian sebab saksi tersebut dapat saja mengelak untuk tidak mau dimintai keterangannya di Negara Peminta.

Sehubungan pula dengan hak imunitas bagi warga asing tidak dapat dikenakan sanksi apapun berdasarkan hukum Indonesia kepada warga negara asing yang tidak mau dihadirkan sebagai saksi guna meminta keterangan, dokumen, alat bukti lainnya atau memberikan bantuan lain dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses hukum di Indonesia.

UU No.1 Tahun 2006 juga mengandung prinsip imunitas yang cukup kuat di mana undang-undang ini memberikan kekebalan hukum dan hak istimewa untuk melindungi hak orang tersebut atau hak sebagai warga negara untuk tidak ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Indonesia untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut.

Hak istimewa dan kekebalan sebagai misi diplomatik sudah merupakan hukum kebiasaan internasional yang sudah ditransformasikan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Dipolomatik⁵⁶ dan ketentuan inilah yang dikodifikasi ke dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Meskipun kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional sudah ditransformasikan menjadi substansi suatu konvensi, hakekatnya sebagai hukum kebiasaan internasional tidaklah hilang, melainkan masih tetap eksis dan berlaku sebagai hukum internasional positif.⁵⁷ Hak kekebalan ini pada awalnya dianut dalam prinsip hubungan diplomatik berdasarkan prinsip nasional aktif guna melindungi kedaulatan suatu negara tertentu.⁵⁸ Prinsip ini menjadi penghalang dalam

⁵⁵ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 50.

⁵⁶ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hal. 221.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 222.

proses penyidikan yang melibatkan warga negara asing atau unsur asing guna proses penegakan hukum di Negara Peminta.

Upaya yang dilakukan Polda Sumut adalah menjumpai langsung saksi di tempat kediamannya yakni di wilayah Negara asalnya melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian setempat. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara menghadirkan saksi melalui komunikasi jarak jauh (video conference) tetapi tidak pernah dilakukan. Upaya yang cenderung menjadi alternatif dilakukan Polda Sumut adalah dengan berkoordinasi dengan *Senior Liaison Officer* (SLO) Polri yang berada di Malaysia melalui Dibhubinter Polri yang ada di Jakarta.⁵⁹ Tidak pernah dilakukan penyidik secara langsung menemui saksi di tempat kediamannya di negara asalnya.

- b. Permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing untuk mendapatkan alat bukti

Sulitnya permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara Malaysia dalam mendapatkan alat bukti guna penegakan hukum terhadap kasus penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal. Hambatan tersebut berdampak pada kurangnya kemauan pembuktian bagi aparat penegak hukum. Negara Peminta tidak dapat begitu saja mengambil barang bukti tanpa persetujuan Negara Diminta karena dapat melanggar kedaulatan teritorial Negara Diminta. Cara yang dapat dibenarkan adalah dengan meminta bantuan kepada Negara Diminta supaya mencari, mengumpulkan dan mengidentifikasinya, setelah itu memberitahunya kepada Negara Peminta bantuan hukum sesuai dengan yang dibutuhkan guna proses hukum di Negara Peminta.⁶⁰ Upaya yang ditempuh Penyidik Polda Sumut berkoordinasi dengan *Senior Liaison Officer* (SLO) Polri yang berada di Malaysia melalui Dibhubinter Polri yang ada di Jakarta.⁶¹

- c. Mencari keberadaan pelaku

Pelaku dalam kasus penempatan TKI secara ilegal ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di sini dilakukan oleh orang perseorangan bukan sebuah lembaga resmi sehingga Polda Sumut terkendala dalam mencari keberadaan pelaku. Upaya Polda Sumut adalah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, pihak Kantor Imigrasi, pihak Kantor Bea dan Cukai untuk mempersempit ruang gerak, peluang untuk memberikan surat pengantar mengurus paspor atau surat-surat yang berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri bagi yang tidak memiliki izin usaha untuk mengirimkan TKI ke luar wilayah Negara Indonesia serta menjalin koordinasi dengan pihak PJTKI.⁶²

- d. Koordinasi pembuatan paspor

Antara pihak Polda Sumut dengan Kantor Imigrasi kurang koordinasi dalam hal kepengurusan pembuatan paspor. Kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak Kantor Imigrasi membuat celah kesempatan bagi sindikat pelaku penempatan TKI ilegal. Seharusnya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap arus lalu lintas barang dan jasa serta orang, pihak Kantor Imigrasi harus berhati-hati dalam mengeluarkan paspor untuk bepergian ke luar negeri.

- e. Mengidentifikasi kasus-kasus penempatan TKI ilegal

Pada umumnya kasus-kasus penempatan TKI ilegal yang masuk ke Polda Sumut sifatnya menunggu atau ditunggu. Pihak Kepolisian khususnya Polda Sumut kurang bersifat aktif dalam hal melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum pelaku ataupun

⁵⁹ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe pada tanggal 25 Maret 2013.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 155-156.

⁶¹ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe pada tanggal 25 Maret 2013.

⁶² Wawancara dengan Kasubdit IV Renakta Polda Sumut pada tanggal 27 Februari 2012. Lihat juga: Laporan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal tentang Data Kasus TKI Tahun 2011 di Jajaran Polda Sumut, oleh Kasubdit IV Renakta.

sindikatan penempatan TKI ilegal ke luar negeri. Di mana pihak Kepolisian pada umumnya bersifat menunggu laporan atau pengaduan yang masuk ke daftar laporan Polda Sumut baru kemudian pihak Polda Sumut melakukan penyidikan atas kejadian perkara tersebut.

Secara menyeluruh kinerja penanganan kejahatan penempatan TKI ilegal di Sumatera Utara masih dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan lembaga-lembaga lain (PJTKI), BP3TKI Sumut, secara sendiri-sendiri dan belum dapat diintegrasikan secara bersama-sama dalam satu persepsi serius dalam mencegah dan memberantas pelaku penempatan TKI ilegal.

Penanganan penempatan TKI ilegal mutlak diperlukan perangkat hukum antara lain: UUPTPO, UUPPTKI, UUPA, UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan peraturan lainnya termasuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara. Reintegrasi dalam penerapan perangkat hukum ini sering kali menjadi dilema di pihak aparat penegak hukum dan instansi Pemerintah yang bekreweangan di bidangnya. Dilema tersebut seperti anggapan bahwa instansinya adalah yang paling baik dan berwenang dalam mengatasi permasalahan, kurang terintegrasi sistem kerjasama yang baik dari sisi loyalitas antara lembaga dalam transparansi permasalahan sehingga masalah cenderung dihadapi dan ditanggung secara sendiri-sendiri oleh lembaga yang menghadapinya.

Dalam mengidentifikasi kasus-kasus penempatan TKI secara ilegal yakni melakukan upaya langkah preemtif dan preventif. Bersifat preemtif misalnya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi undang-undang dan penyadaran hukum terhadap masyarakat akan tingginya risiko TKI ilegal di mana bahwa persoalan hukum yang mesti ditempuh TKI di luar negeri mesti ditempuh dalam waktu yang lama dan berlarut-larut.

Langkah preventif yang dilakukan Polda Sumut misalnya melakukan pencegahan melalui pengawasan ketat, mempersempit ruang atau peluang dalam hal pembuatan paspor, mempersempit terhadap pengeluaran dokumen resmi di Kantor Imigrasi dan bandara serta tempat-tempat transit para TKI ilegal. Upaya ini dilakukan Polda Sumut secara terintegrasi antar lintas lembaga.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini disimpulkan:

- a. Pengaturan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari HAM. Dalam kaitan ini pengaturan tindak pidana dalam penempatan TKI merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya. Pengaturannya tersebar dalam bentuk delik yang diatur dalam UUPTPO dan UUPPTKI. Penempatan TKI dapat berakhir pada tindakan memperdagangkan orang dan dapat pula berupa pelanggaran terhadap UUPPTKI. Dalam UUPPTKI pengaturan tindak pidana hanya diatur larangan bagi setiap orang perseorangan yang ilegal menempatkan TKI ke luar negeri atau perbuatan setiap orang yang tergabung dalam perusahaan penyedia jasa TKI yang tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam UUPPTKI.
- b. Peranan Penyidik Polda Sumut dalam penanganan tindak pidana penempatan TKI di luar negeri mengoptimalkan kerjasama antara negara dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kerjasama tersebut terjalin melalui perjanjian yang didasarkan pada UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kerjasama dapat melalui perjanjian antar kedua negara sehingga semakin mempermudah proses hukum terhadap kasus tindak pidana penempatan TKI ilegal

ke Malaysia khususnya yang dilakukan oleh tersangka orang perseorangan atas nama Berta Jojo Hutasoit.

- c. Hambatan-hambatan Polda Sumut dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang bersifat yuridis antara lain: sulitnya menghadirkan alat bukti keterangan saksi karena melibatkan negara asing (Malaysia), hambatan dalam permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti mesti harus melalui kewenangan Menteri Hukum dan HAM, hambatan dalam pembuktian dokumen elektronik kurang dipahami aparat penegak hukum dalam prosedur pembuktiannya, hambatan dalam mencari keberadaan pelaku karena dilakukan oleh orang perseorangan tidak merupakan badan hukum yang memiliki status yang jelas, hambatan dalam koordinasi pembuatan paspor terlalu mudah dalam urusan pembuatan paspor, hambatan dalam mengidentifikasi kasus-kasus penempatan TKI ilegal hanya bersifat menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat khususnya korban TKI atau keluarganya serta hambatan yang bersifat non yuridis. Upaya yang dilakukan pihak Polda Sumut secara keseluruhan adalah meningkatkan langkah preemtif, preventif, dan refresif melalui koordinasi secara terintegrasi antar lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan menerapkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

2. Saran

Saran-saran yang diharapkan terhadap permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar dalam penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap tindak pidana lintas negara dalam hal ini penempatan TKI di luar negeri diupayakan optimalisasi UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana sehingga dapat dilaksanakan dalam memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam mencari keadilan.
- b. Diharapkan agar kerjasama bantuan hukum timbal balik mesti didahulukan prinsip kepentingan nasional Negara Peminta Bantuan guna mempercepat proses penegakan hukum di Negara Peminta Bantuan.
- c. Diharapkan agar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar tindakan pencegahan sebagai upaya prioritas bagi Polda Sumut dari pada penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistim Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Arto, A. Mukti, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- _____. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Effendi, Bachtiar, dkk., *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Friedman, Lawrence. M., *American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- _____. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- Harahap, A. Bazar dan Nawangsih, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Indpenden Indonesia-Pecirindo, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedia, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Humphrey, John P., *Magna Charta Umat Manusia*, diterjemahkan oleh: Peter Devies, HAM, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Jauhari, Iman, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Ha-Hak Anak dan Penerapannya*, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2005.
- Kanter, EY. dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1988.
- Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- _____. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nugroho, Fuji, *Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi*, Jakarta: USAID, 2006.
- Pangaribuan, Emmy S., *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangan*, BPHN: 1980.
- Parthiana, I. Wayan, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta: C.V. Mandar Maju, 2001.
- Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *International Organization for Migration*, Jakarta: IOM, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Restuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Sadino, Oetarid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluhenam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sholehuddin, M., *Sistim Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.

- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Supomo, R., *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Syafaat, Rahmat, *Dagang Manusi, Kajian Trafiking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Triatmojo, Sudibyo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, 1982.
- Widhayanti, Erni, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Zahrah, Latifah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Penempatan Calon Tenaga Kerja (CTKI) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2010.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

C. Makalah dan Jurnal

- Husein, Yunus, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan Dalam Perjanjian Bantuan Hukum timbal Balik Mengenai tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, Tanggal 29 s/d 30 Agustus 2006.
- Sahetapy, Elfina Lebrine, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Etiologi Kriminal", *Jurnal Yustika*, Vol. 13, 1 Juli 2010, Fakultas Hukum Ubaya.
- Sitompul, Zulkarnain, "Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerja Sama Internasional", Artikel dalam *Jurnal Forum Keadilan*, Nomor 40, Tanggal 13 Februari 2005.
- _____, "Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Artikel versi PDF*, Jakarta: Oktober 2003.

D. Dokumen/Surat/Laporan dari Instansi Terkait

- Berita Acara Pemeriksaan Korban Rini Helena Agustina Hutapea pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2011 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe bersama-sama dengan Penyidik Pembantu Martianna Sembiring.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anggiat Napitupulu pada Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2010 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe.
- Berita Acara Pemeriksaan tersangka Berta Jojo Hutasoit pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe.

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Siti Rolijah, SH, M.Hum pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2010 oleh Penyidik Polda Sumut Franciska PS Munthe.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011.
- Deputi Seswapres Bidang Politik, “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi UU No 21 tahun 2007”, Makalah dalam Lokakarya *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan, Tanggal 10 Mei 2007.
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, “Data Kasus TKI Tahun 2012 di Jajaran Polda Sumut.
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, “Data Kasus TKI Tahun 2012 di Jajaran Polda Sumut.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-205/N.2.4/Epp.2/01/2011 tertanggal 18 Januari 2011.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-205/N.2.4/Epp.2/01/2011 tertanggal 18 Januari 2011.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, “Laporan Anev Tahunan Polda Sumut T.A. 2012”, Pada Bulan Januari 2013.
- Laporan Kasubit IV Renakta Polda Sumut Tahun 2011.
- Laporan Polisi Nomor Pol. LP/355/X/2010/ Dit Reskrim atas nama pelapor Ellysa Basa Hutasoit dan korban anaknya sendiri yang bernama Rini Helena Agustina Hutapea.
- Laporan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal tentang Data Kasus TKI Tahun 2011 di Jajaran Polda Sumut, oleh Kasubdit IV Renakta.
- LP/488/VII/2012/SPKT Reskrim Binjai Tanggal 4 Juli 2012.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Hubungan Internasional, Surat Nomor Divhubinter/Fax/2599/XII/2010 kepada kapolda Sumut tertanggal 14 Desember 2010 atas nama Anas Yusuf (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Karo Misi Internasional.
- Polisi Diraja Malaysia, Nomor Laporan Dato Keramat/00317710/10 atas nama Polisi Malaysia Noorsiah BT MD Zulkifli.
- Surat Interpol Kuala Lumpur Nomor: (IP) KPN (PR) 71/5/47 tertanggal 29 November 2010 perihal WNI atas nama Rini Helena Agustina Hutapea.
- Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B/6344/N.2.4/Epp.2/12/2010 tertanggal 3 Desember 2010 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan An. Tersangka Berta Jojo Hutasoit Dinyatakan Belum Lengkap (P-19).

E. Internet

- <http://kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/malaysia.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2013.
- <http://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/>, diakses tanggal 08 Februari 2013. Oleh: Rizki Amelia Febriani, “Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia Dengan Negara Lain”.
- <http://tki.web.id/?tag=tindak-pidana>, diakses tanggal 18 Februari 2013. TKI Ilegal Juga Harus Dilindungi. Ditulis Admin Kementerian Luar Negeri.
- <http://kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/malaysia.htm>, diakses tanggal 20 Maret 2013.
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/27/173464026/TKI-Korban-Perkosaan-Dituding-Serahkan-Badan>, diakses tanggal 18 Februari 2013.
- <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7579-kepala-bnp2tki-dukung-penghentian-penempatan-tki-ke-malaysia.html>, diakses tanggal 20 Februari 2013. Ditulis dalam kolom berita BNP2TKI.

- <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/04/21555459/Mafia.TKI.Berkedok.Penempatan.Resmi.>, diakses tanggal 20 Februari 2013. Mafia TKI Berkedok Penempatan Resmi: Ditulis oleh Hamzirwan, Tanggal 4 Desember 2012.
- <http://www.kampungtki.com/baca/33714>, diakses tanggal 18 Februari 2013. TKI Rokiyah Lumpuh Sepulang Dari Jordan. Ditulis oleh: Advokasi BNP2TKI.
- <http://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/>, diakses tanggal 08 Februari 2013. Oleh: Rizki Amelia Febriani, "Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia Dengan Negara Lain".